

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP )



DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN BANGGAI  
TAHUN ANGGARAN 2019

## **KATA PENGANTAR**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Tahun 2019 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai kepada publik atas kinerja pada Tahun Anggaran 2019. Selain itu, LKjIP juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penyusunan LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Tahun 2016 - 2021.

Pemerintah Kabupaten Banggai sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 melaksanakan restrukturisasi kelembagaan sehingga beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Banggai, termasuk diantaranya Badan Lingkungan Hidup (BLH) berubah menjadi suatu Dinas, yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Dalam penyusunan LKjIP Tahun 2019 ini diharapkan adanya umpan balik perbaikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup sehingga semakin mampu memperlihatkan pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di daerah lebih berdayaguna dan berhasil guna. Selain itu juga diharapkan nantinya akan

bermanfaat untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Demikian yang dapat disampaikan. Terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan LKjIP Tahun 2019 ini. Semoga dengan LKjIP ini menjadikan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai sebagai instansi yang transparan dan berakuntabilitas.

Luwuk, Pebruari 2020  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN BANGGAI  
  
**MUH. SAFARI JUNUS, SH., M.Si**  
Pembina Tkt. I, IV/b  
NIP. 19710506 199603 1 006

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola Sumber Daya Alam secara bijaksana dalam pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat baik generasi sekarang maupun mendatang. Dalam pengertian ini tersirat bahwa dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan tersedianya sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah provinsi/kabupaten/kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri.

Dalam penyusunan LKjIP ini disajikan tentang Indikator Keberhasilan dan Kegagalan dalam pencapaian sasaran, tujuan dan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sehingga diperlukan pola pengukuran kinerja mulai Rencana Strategis, dan berakhir sampai dengan pengukuran kinerja atas sasaran program kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK).

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai mempunyai tugas pokok membantu

Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang lingkungan hidup, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang lingkungan, yaitu Bidang Tata Lingkungan yang meliputi Seksi Inventarisasi, Rencana engolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPHL) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Seksi Kajian Dampak Lingkungan, Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup; Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 meliputi Seksi Pengurangan Sampah, Seksi Penanganan Sampah, Seksi Limbah B3; Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup meliputi Seksi Pemantauan Lingkungan, Seksi Pencemaran Lingkungan, Seksi Kerusakan Lingkungan; Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup meliputi Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Seksi Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan, Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Lingkungan.

Pada tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai telah melaksanakan 13 program dan 50 kegiatan. Anggaran dari semua program dan kegiatan tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Banggai Tahun 2019. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap keuangan dan kinerja tahun 2019, penyerapan keuangan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp.16.879.114.475,- atau 92,42% dari seluruh anggaran.

Hasil evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator sasaran pada Dinas

Lingkungan Hidup Tahun 2019, sebagai berikut :

- a. Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan indikator kinerja indeks kualitas lingkungan hidup dan persentase pengelolaan sampah secara terpadu yang terdiri dari :
- pengendalian pencemaran air, udara, kerusakan lingkungan hidup dan ketaatan terhadap aturan lingkungan hidup yang dengan pagu anggaran Rp. 976.643.166,- realisasi Rp. 878.565.304,- (89,96%), dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 82,065% dari 67,00% yang ditargetkan.
  - Persentasi pengurangan dan penanganan sampah dengan pagu anggaran Rp. 8.833.245.591,- realisasi Rp. 8.666.877.845,- (98,12%), dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 42,44% dari 100% yang ditargetkan. Target kinerja yang ditetapkan belum dapat dicapai karena dalam pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain :
    1. Sarana dan prasarana dalam menunjang pengelolaan sampah belum memadai.
    2. Ketersediaan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan sampah belum memadai.
    3. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah masih kurang.
- b. Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dengan indikator kinerja nilai akuntabilitas Kinerja pagu anggaran Rp. 1.938.418.983,- realisasi Rp. 1.826.337.574,- (94,22%) dengan capaian kinerja nilai SAKIP A.

Selanjutnya hasil evaluasi dan analisis di atas akan dijadikan masukan agar pencapaian sasarannya sesuai dengan yang diharapkan.

Beberapa prinsip penyusunan dan penyajian laporan telah disajikan dengan berbagai pertimbangan. Prinsip-prinsip pelaporan yang baik mungkin saja tidak semua dapat diterapkan pada laporan LKjIP ini, namun demikian laporan ini masih memenuhi tujuan penyusunannya.

Luwuk, Pebruari 2020

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN BANGGAI



**MUH. SAFARI JUNUS. SH., M.Si**

Pembina Tkt. I, IV/b

NIP. 19710506 199603 1 006

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Dinas lingkungan Hidup Kab. Banggai.....	2
C. Sistematika Penyajian .....	17
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Banggai Tahun 2016 2021 .....	21
B. Rencana Strategis DLH Kab. Banggai Tahun 2016 – 2021 .....	23
C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran .....	24
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 .....	25
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	31
1. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2019 .....	31
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Dengan Tahun Lalu .....	34
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis .....	36
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Dengan Standar Nasional .....	36
5. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Kegagalan .....	37
6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	39
7. Analisis Program Dan Kegiatan Pebunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja .....	46
B. Realisasi Anggaran .....	48



**BAB IV PENUTUP**

A. Tinjauan Umum Keberhasilan .....	61
B. Permasalahan yang Berkaitan Dengan Pencapaian Kinerja.....	62
C. Strategi Pemecahan Masalah .....	63

**Lampiran–Lampiran**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Pejabat Struktural Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Tahun 2019 .....	5 – 6
Tabel 1.2	Data PNS, CPNS dan Tenaga Kontrak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Tahun 2019.....	6
Tabel 1.3	Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan, Jenis Kelamin, Pendidikan dan Disiplin Ilmu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Tahun 2019 .....	7
Tabel 1.4	Data Sarana dan Prasarana Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 .....	9
Tabel 1.5	Data Supras Peralatan UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 .....	10
Tabel 1.6	Data Supras Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Tahun 2015 s/d Tahun 2019 .....	11 – 12
Tabel 1.7	Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Tahun 2019.....	13 - 16
Tabel 2.1	Program Kegiatan Indikator Sasaran ke - 1 .....	27 – 28
Tabel 2.2	Program Kegiatan Indikator Sasaran ke - 2.....	29
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Tahun 2019.....	32
Tabel 3.2	Perbandingan Realisasi Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai .....	34
Tabel 3.3	Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 di Bandingkan Target Akhir Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Tahun 2021.....	36
Tabel 3.6	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	39
Tabel 3.7	Alokasi Persasaran Pembangunan .....	41 – 45
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran.....	49 - 60

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Seiring dengan semangat reformasi dan otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama pola manajemennya. Salah satu perubahan yang dimaksud adalah penerapan paradigma pemerintahan yang baik (Good Governance) yang merupakan syarat bagi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa Indonesia. Tuntutan publik menghendaki agar pemerintah dapat menerapkan paradigma pemerintahan yang baik (Good Governance) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR RI Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Dalam LKjIP disajikan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2019.

Penyusunan LKjIP ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu unsur dari rangkaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai. Maksud Penyusunan LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai tahun 2019 adalah sebagai penjabaran dari Tujuan Dinas Lingkungan Hidup yang diwujudkan dalam keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam Penyusunan LKjIP tahun 2019 menyajikan laporan mengenai hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Terkait dengan hal tersebut, maka tujuan Penyusunan LKjIP ini adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan Dinas Lingkungan Hidup dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

## **B. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGGAI**

### **1. Tugas Pokok Dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Nomor 25 Tahun 2017, tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut :

**a. Tugas**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup.

**b. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lingkungan hidup;
- 4) Pelaksanaan administrasi di bidang lingkungan hidup; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**2. Gambaran Umum Organisasi**

Menciptakan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, memelihara daya dukung lingkungan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam agar berfungsi secara optimal yang mengarah ada keseimbangan dinamis antara aspek teknis kesemuanya diperuntukkan sebesar-besarnya guna kemakmuran rakyat generasi sekarang maupun yang akan datang.

Disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah melaksanakan pengelolaan, pengendalian, pencegahan dan pemulihan akibat kegiatan/ usaha yang berpotensi pencemaran. Hal ini tentunya harus didukung dengan sarana

prasarana yang memadai, sedangkan sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai baik dari segi pendanaan maupun Sumber Daya Manusia (SDM) serta sarana pendukung lainnya masih terbatas.

**a. Kepegawaian**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai No. 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh Sekretaris dengan 4 Kepala Bidang yaitu Kepala Bidang Tata Lingkungan, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan ditambah 1 Kepala UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai didukung oleh 116 personil terdiri dari 54 PNS dan 62 tenaga kontrak meliputi:

- Golongan IV : 5 Orang
- Golongan III : 42 Orang
- Golongan II : 6 Orang
- Golongan I : 1 Orang

Data personil Dinas Lingkungan Hidup menurut tingkat pendidikan untuk menunjang tugas-tugas Dinas sampai dengan tahun 2019 meliputi:

a. PNS

- ✓ Pasca Sarjana (S2) : 7 Orang
- ✓ Sarjana (S1) : 31 Orang
- ✓ Sarjana Muda (D3) : 4 Orang
- ✓ SMA : 11 Orang
- ✓ SLTP : 1 Orang

b. Tenaga Kontrak

- ✓ Sarjana (S1) : 16 Orang
- ✓ SLTA : 46 Orang

Adapun lebih jelasnya data personil Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1. Data Pejabat Struktural Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banggai Tahun 2019

UNIT KERJA	ESELON			PNS			
	IV	III	II	GOL. I	GOL. II	GOL. III	GOL. IV
<b>Kepala Dinas</b>	-	-	1	-	-	-	1
<b>Sekretaris</b>	-	1	-	-	-	-	1
✓ Kasubag. Umum dan Kepegawaian	1	-	-	-	-	1	-
✓ Kasubag. Keuangan dan Aset	1	-	-	-	-	1	-
✓ Kasubag. Perencanaan dan Evaluasi	1	-	-	-	-	1	-
<b>Kepala Bidang Tata Lingkungan</b>		1	-	-	-	-	1
✓ Kasie. Inventarisasi, Rencana Pengolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPHL) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	1	-	-	-	-	1	-
✓ Kasie. Kajian Dampak Lingkungan	1	-	-	-	-	1	-
✓ Kasie. Pemeliharaan Lingkungan Hidup	1	-	-	-	-	1	-
<b>Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3</b>		1	-	-	-	-	1
✓ Kasie. Pengurangan Sampah	1	-	-	-	-	1	-
✓ Kasie. Penanganan Sampah	1	-	-	-	-	1	-

✓ Kasie. Limbah B3	1	-	-	-	-	1	-
<b>Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	-	1	-	-	-	-	1
✓ Kasie. Pemantauan Lingkungan	1	-	-	-	-	1	-
✓ Kasie. Pencemaran Lingkungan	1	-	-	-	-	1	-
✓ Kasie. Kerusakan Lingkungan	1	-	-	-	-	1	-
<b>Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup</b>	-	1	-	-	-	-	1
✓ Kasie. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	-	-	-	-	1	-
✓ Kasie. Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan	1	-	-	-	-	1	-
✓ Kasie. Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	-	-	-	-	1	-
<b>Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan</b>	1	-	-	-	-	1	-

Tabel 1.2. Data PNS, CPNS dan Tenaga Kontrak Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banggai Tahun 2019

NO.	JABATAN STRUKTURAL	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH	KET.
1	Kepala Dinas	Pembina Tkt.I (IV/b)	S-2	1	
2	Sekretaris	Pembina Tkt.I (IV/b)	S-1	1	
3	Kepala Bidang	Pembina (IV/a) s/d Penata Tkt.I (III/d)	S-1/S-2	4	
4	Kasubag/Kasie.	Penata Tkt.I (III/d) s/d Penata Muda Tkt.I (III/b)	S-1/S-2	1 5	
5	Staf	Penata Tkt.I (III/d) s/d Juru Muda (I/c)	SMA/S-1/S2	33	
		Tenaga Kontrak	SMA/S-1	72	
<b>Jumlah</b>				<b>117</b>	



Tabel 1.3. Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan, Jenis Kelamin, Pendidikan dan Disiplin Ilmu di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banggai Tahun 2019.

NO.	GOLONGAN	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN
1	Pembina Tkt.I, IV/b	L : 1 P : 1	S-2 : 1 orang S-1 : 1 orang
2	Pembina, IV/a	L : 2 P : 1	S-2 : 2 orang S-1 : 1 orang
3	Penata Tkt.I, III/d	L : 9 P : 2	S-2 : 3 orang S-1 : 8 orang
4	Penata, III/c	L : 5 P : 4	S-1 : 8 orang SMA : 1 orang
5	Penata Muda Tkt.I, III/b	L:10 P : 6	S-1 : 12 orang SMA : 4 orang
6	Penata muda, III/a	L : 3 P : 3	S-1 : 2 orang SMA : 4 orang
7	Pengatur Tkt.I, II/d	P : 1	D-3 : 1 orang
8	Pengatur, II/c	L : 1 P : 1	D-3 : 1 orang SMA : 1 orang
9	Pengatur Muda Tkt.I, II/b	L : 2	SMA : 2 orang
10	Pengatur Muda, II/a	L : 1	SMA : 1 orang
11	Juru Muda, I/c	L : 1	SMA : 1 orang
12	Tenaga Kontrak	L : 21 P : 41	S-1 : 16 orang SMA : 56 orang

### 3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan

3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Tata Lingkungan, membawahi:
  1. Seksi Inventarisasi, Rencana Pengolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPHL) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
  2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan
  3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, membawahi:
  1. Seksi Pengurangan Sampah;
  2. Seksi Penanganan Sampah; dan
  3. Seksi Limbah B3.
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi:
  1. Seksi Pemantauan Lingkungan;
  2. Seksi Pencemaran Lingkungan; dan
  3. Seksi Kerusakan Lingkungan.
- f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi:
  1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  2. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan; dan
  3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### 4. Sarana dan Prasarana

Disamping dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai memiliki sarana prasarana sebagai berikut :

Tabel 1.4. Data sarana dan prasarana persampahan tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup

No.	Jenis Barang	Jumlah Unit	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1.	Alat Angkut Sampah Dump Truck	15 Unit	10	2	3
2.	Alat Angkut Sampah Armroll	6 Unit	4	1	1
3.	Alat Angkut Sampah Motor Roda 3	8 Unit	3	5	-
4.	Buldozer	2 Unit	1	1	-
5.	Exapator	2 Unit	2	-	-
4.	Kontainer Sampah	15 Unit	4	8	3
5.	Gerobak Sampah	32 Unit	6	11	15
<b>Jumlah</b>		<b>76 Unit</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>22</b>

Sumber : Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH.

Tabel 1.5. Data Sapras Peralatan UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019.

No.	Jenis Barang	Merek	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1.	AAS	Buck	-	1	-
2.	Spekrofotometer UV-Vis	Spectroquan Phoare 3000 Merck	1	-	-
3.	Water test kit & Bcteriological	Inscienpro WX- 02	1	-	-
4.	Speltroportable	Merck	1	-	-
5.	Termometer	-	1	-	-
6.	pH Meter	pH 330i/ SET	1	-	-
7.	DO Meter	Oxi 315i/SET	-	-	1
8.	Turbidity	TurbiQuant 1100IR	-	-	1
9.	Conduktometer	Cond 315i/ SET	-	-	1
10.	Flowmeter	-	-	-	1
11.	TDS Meter	-	1	-	-
12.	Complete Multi gas Detector	-	1	-	-
13.	PortableThermohyrometer	-	1	-	-
14.	Real Time particulate	-	1	-	-
15.	Potable DO Meter	-	1	-	-
16.	Portable Conductivity Meter	-	1	-	-
17.	Portable pH Meter	-	1	-	-
18.	Timbangan Analitik 4 Digit	-	1	-	-
19.	Current Meter	-	1	-	-
20.	Sounder	-	1	-	-
21.	Mobil oprasional	Renger	-	1	-
<b>Jumlah</b>		<b>21 Unit</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>4</b>

Sumber : UPTD Laboratorium Lingkungan DLH.

Tabel 1.6. Data Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup dari tahun 2015 sampai tahun 2019.

No.	Jenis Barang	Merek	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1.	Sepeda Motor	Honda Verza	10		
		Honda New Blade	1		
		Honda Vario	4		
		Kawasaki KLX	5		
2.	Sepeda Motor Roda 3		2		
3.	Computer	Lenovo	1		
		HP Desktop	1		
		HP all in one	4		
4.	Note Book	Lenovo	1		
5.	Laptop	Acer	1		
		Azus	3		
6.	Printer	Epson	10		
7.	Lemari	Arsip 3 pintu	1	1	
		Arsip 4 pintu	2		
		4 pintu	2		
		2 pintu	2		
8.	Kursi	Pejabat eselon II	2		
		Pejabat eselon III	4		
		Pejabat eselon IV	14		
		Rapat	40		
9.	AC	Split 1 pk	2		
		LG	2		
		Floor Standing tcl 3pk		3	
		Floor Standing tcl 5pk	3	2	
10.	Meja	Rapat	10		
		Getar	1		
		Pejabat eselon II	1		
11.	Mobil	Dump truck	1		
		Dump truck Toyota dyna	1		
		Dump truck Mitsubishi	1		
		Pick up hilux	1		
12.	Exhause Fan		2		
13.	Lampu rotari		1		
14.	Loudspeaker			2	
15.	Mireophone wirelee		2	1	

16.	Stand loudspeaker			2	
17.	Alat penyaringan pompa	vacum	1		
18.	Destilator		1		
19.	Peralatan tottrasi		1		
20.	Thermohygrometer		9		
21.	Automatic Burette		4		
22.	Water Test		1		
23.	Aerator		2		
24.	Soxiet		4		
25.	Peralatan Refluks		4		
26.	Real Time Darticulate Air Monitor		1		
27.	Wall Mounted Air Purifier for Laboratory		1		
28.	Mesin Absensi	MG 700 Finger Print & Camera	2		
29.	UPS		9	1	
30.	Camera	Mirroles digital	1		
31.	Timbangan Sampah		1		
32.	Alat Pencacah Plastik			1	
33.	Scaner	Epson	1		
34.	Mesin pencacah kompos		1		
35.	Teralis jendela & pintu		1		
36.	Desicator	vacum	2		
37.	CCTV		1		
<b>Jumlah</b>			<b>186</b>	<b>13</b>	<b>0</b>

Sumber : Sub Bagian Aset dan Keuangan DLH.

## 5. Pembiayaan

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Tahun 2019, dalam pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai memperoleh anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Banggai sebesar **Rp.17.905.800.866,-** (*tujuh belas milyar sembilan ratus lima juta delapan ratus ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah*) yang secara rinci disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.7. Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2019.

No	Program dan Kegiatan	Anggaran		Ket.
		APBD Murni	APBD Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>6.164.117.622</b>	<b>6.157.493.126</b>	
	Belanja Pegawai	6.164.117.622	6.157.493.126	
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>10.993.307.740</b>	<b>11.748.307.740</b>	
	<b>01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.388.898.513</b>	<b>1.592.203.513</b>	
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000	3.000.000	
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	85.480.444	85.480.444	
	3. Penyediaan jasa kebersihan kantor	65.000.000	65.000.000	
	4. Penyediaan alat tulis kantor	9.485.569	12.990.569	
	5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.000.000	7.000.000	
	6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	55.000.000	55.000.000	
	7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000	3.000.000	
	8. Penyediaan makanan dan minuman	10.000.000	10.000.000	
	9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	156.000.000	260.000.000	
	10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	160.000.000	160.000.000	
	11. Penyediaan jasa administrasi perkantoran	611.400.000	611.400.000	
	12. Penguatan Kelembagaan UPTD	227.532.500,	319.332.500	
	<b>02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>93.832.500</b>	<b>115.693.670</b>	
	1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	23.952.500	27.308.670	
	2. Pengadaan peralatan gedung kantor	16.005.000	34.510.000	
	3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	46.400.000	46.400.000	
	4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2.100.000	2.100.000	

5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.375.000	5.375.000
<b>03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>45.000.000</b>	<b>54.015.800</b>
1. Pendidikan dan pelatihan formal	45.000.000	54.015.000
<b>04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>89.145.800</b>	<b>80.132.000</b>
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10.632.000	10.632.000
2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	11.640.800	-
3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	10.000.000	10.000.000
4. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	50.000.000	52.625.000
5. Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah	6.875.000	6.875.000
<b>05 Program Pengembangan Sistem Informasi/Data</b>	<b>32.374.000</b>	<b>32.374.000</b>
1. Penyusunan Profil Perangkat Daerah	25.000.000	25.000.000
2. Pemuktahiran data Kepegawaian	7.374.000	7.374.000
<b>06 Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan</b>	<b>60.000.000</b>	<b>64.000.000</b>
1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan	60.000.000	64.000.000
<b>07 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	<b>8.393.815.591</b>	<b>8.801.070.591</b>
1. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	960.817.000	1.193.572.000
2. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	1.583.038.591	1.758.038.591
3. Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan	5.685.735.000	5.685.735.000
4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	147.110.000	146.610.000
5. Inventarisasi Potensi Retribusi Persampahan	17.115.000	17.115.000
<b>08 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>432.980.000</b>	<b>554.315.000</b>



1. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	76.880.000	116.880.000
2. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	27.100.000	27.100.000
3. Pengelolaan B3 dan Limbah B3	32.175.000	32.175.000
4. Pengkajian dampak lingkungan	12.850.000	12.850.000
5. Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)	31.760.000	31.760.000
6. Koordinasi penyusunan AMDAL	48.500.000	48.500.000
7. Pemantauan Kualitas Air	21.640.000	21.640.000
8. Pengawasan dan Penanggulangan Bahan Perusak Ozon (BPO)	11.000.000	11.000.000
9. Gas Rumah Kaca (GRK)	18.900.000	18.900.000
10. Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	39.480.000	39.480.000
11. Pemantauan dan Penanggulangan Pencemaran Sumber Pencemar Institusi dan Non Institusi	22.264.000	22.264.000
12. Pemeliharaan, Penghijauan Lingkungan	52.121.000	52.121.000
13. Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan di Sektor Kehutanan	38.310.000	119.645.000
<b>09 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>	<b>45.000.000</b>	<b>45.000.000</b>
1. Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	20.000.000	20.000.000
2. Peningkatan Pelayanan Sengketa Lingkungan Hidup	25.000.000	25.000.000
<b>10 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam</b>	<b>285.533.000</b>	<b>282.776.830</b>
1. Rehabilitasi hutan dan lahan	225.533.000	223.172.180
2. Penanggulangan dan Rehabilitasi Mangrove	60.000.000	59.604.650
<b>11 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>	<b>44.481.336</b>	<b>44.481.336</b>
1. Sosialisasi Program Sekolah Adiwiyata	44.481.336	44.481.336
<b>12 Program Peningkatan Pengendalian Polusi</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>
1. Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industry	12.000.000	12.000.000

<b>13 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan</b>	<b>70.245.000</b>	<b>70.245.000</b>
1. Pengelolaan Hutan Kota	70.245.000	70.245.000

---

---

## 6. Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan, identifikasi terhadap isu nasional dan isu lingkungan hidup Kabupaten Banggai, serta hasil telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah, Renstra dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang harus mendapat perhatian utama dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

Dengan menggunakan metode SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat) maka disusun isu-isu strategis, sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kapasitas SDM dalam pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum;
- 2) Penyediaan sarana dan prasarana persampahan yang memadai;
- 3) Penyediaan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang komprehensif sebagai bahan penyusunan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 4) Peningkatan penerapan teknologi ramah lingkungan;
- 5) Pengembangan metode evaluasi pelaksanaan program;

- 6) Pengembangan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, kebersihan dan persampahan;
- 7) Optimalisasi penegakan hukum;
- 8) Pencarian dana dari sumber lain secara aktif;
- 9) Koordinasi dan kemitraan yang intensif;
- 10) Penyusunan produk hukum dibidang lingkungan hidup;
- 11) Pengembangan penyelenggaraan sosialisasi.
- 12) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanganan kebersihan dan persampahan.

### **C. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Tahun 2019 terdiri dari 4 (empat) Bab dan beberapa lampiran. LKjIP disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**Kata Pengantar**

**Ikhtisar Eksekutif**

**Daftar Isi**

**Daftar Tabel**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

A. Capaian Kinerja Organisasi pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisa capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahunan ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran

yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### **BAB IV PENUTUP**

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

#### **LAMPIRAN;**

- 1 Perjanjian Kinerja
- 2 lain-lain yang dianggap perlu

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah perencanaan strategis yang merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan atau rangkaian pengambilan keputusan berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun, yang secara sistematis dan berkesinambungan serta memperhatikan dan mempertimbangkan lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan).

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Tahun 2016 - 2021 memuat Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Mendasari Peraturan Bupati Banggai Nomor 25 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai, perlu ditetapkan perencanaan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang lingkungan hidup; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mengoptimalisasi tupoksi serta melaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada:

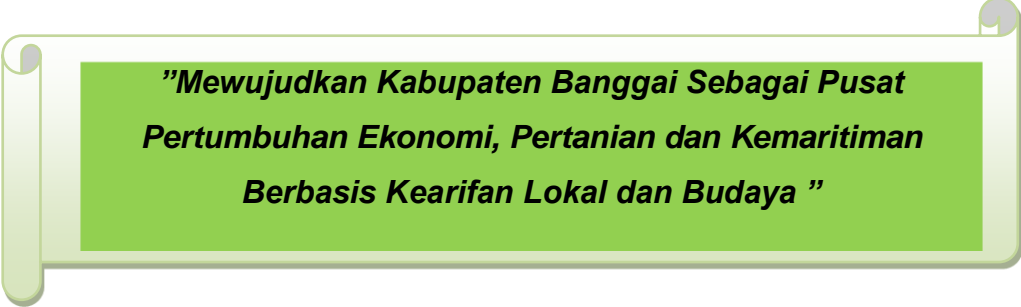
- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021.
- b. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai.
- c. Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019.

## **A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2016 - 2021.**

### **1. Visi**

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016 - 2021. Kabupaten Banggai mencetuskan visi dengan terjalannya sinergi yang dinamis

antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Banggai secara komprehensif, sehingga ditetapkan visi Kabupaten Banggai Tahun 2016 - 2021, yaitu:



***”Mewujudkan Kabupaten Banggai Sebagai Pusat  
Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman  
Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya ”***

## 2. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Banggai 2016-2021, ***“Mewujudkan Kabupaten Banggai Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya”*** ditempuh melalui 6 (enam) misi sebagai berikut.

1. Meciptakan pemerintahan yang baik dan bersih menuju pemerintahan yang beriwibawa, dengan strategi:
2. Mengembangkan pertanian melalui pemanfaatan teknologi, dengan strategi;
3. Mengembangkan sektor kemaritiman berbasis potensi wilayah;
4. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan merata;
5. Mewujudkan pengembangan nilai-nilai budaya kearifan lokal dan agama;
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah.



## **B. RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2016 -2021.**

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan instansi pemerintah dalam periode 5 (lima) tahunan. Rencana strategis ini menjadi dokumen perencanaan untuk arah pelaksanaan program dan kegiatan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai menyusun rencana strategis selama kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD 2016 - 2021 yang berorientasi kepada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Dalam menyusun rencana strategis berpedoman pada visi dan misi Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021. Adapun Visi Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut :

### **1. Visi dan Misi**

Visi Kabupaten Banggai 2016 - 2021 sebagai berikut :

***“Mewujudkan Kabupaten Banggai Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya”***

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut dirumuskan dalam 6 misi Kabupaten Banggai, misi yang sejalan dengan Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Banggai adalah terdapat pada misi ke 4 yaitu:

***“Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Merata”.***

## C. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

### 1. Tujuan

Misi yang berkaitan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai adalah pernyataan misi ke - 4 yaitu ***“Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Merata”***, berkaitan dengan perwujudan misi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam waktu 5 tahun kedepan, yaitu : ***“ Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup”*** di Kabupaten Banggai.

Dalam rangka mencapai target pembangunan daerah, maka pembangunan lingkungan hidup perlu memperhatikan beberapa paradigma pokok yaitu keserasian hubungan antara manusia dengan lingkungan, pemanfaatan sumber daya secara bijaksana, pembangunan yang berwawasan lingkungan serta mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan prinsip - prinsip kebersamaan, berkeadilan dan berkelanjutan.

### 2. Sasaran dan Indikator Sasaran

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun ke depan. Pada sasaran RPJMD yaitu **“meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur yang berwawasan lingkungan”**. Perumusan sasaran tentunya memperhatikan indikator kinerja sesuai tupoksi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk periode 2016 - 2021, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai menetapkan sasaran sebagaimana sasaran strategis berikut:

**“Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”**, dengan indikator sasaran adalah:

- 1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang diukur dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Tutupan Hutan/Vegetasi.
- 2) Persentase Pengelolaan Sampah Secara Terpadu yang diukur dari persentase pengurangan sampah dan persentase penanganan sampah.

Masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran kinerja selama 5 tahun ke depan diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah yang timbul. Tingkat keberhasilan dalam pencapaian indikator sasaran memerlukan kerjasama seluruh pihak baik itu pemerintah, masyarakat dan seluruh stakeholder. Namun dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai menjadi *leading sector* dalam melaksanakan upaya-

upaya penyehatan lingkungan, sehingga tujuan untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Banggai dapat diwujudkan secara bertahap.

#### **D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Perjanjian kinerja yang diformulasikan dalam penetapan kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja juga merupakan ikhtisar dari rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati oleh para pejabat di setiap instansi pemerintah.

Dengan perencanaan dan perjanjian kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Perjanjian Kinerja sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Sebagaimana Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2021, Perjanjian Kinerja tahun 2019 merupakan perjanjian kinerja pembuka yang mengawali pencapaian target. Indikator Kinerja dan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup tahun 2019 secara rinci dapat dilihat dalam lampiran.

Uraian sasaran strategis beserta indikator - indikator Dinas Lingkungan Hidup tahun 2019 berdasarkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2016 -

2021 sebagai berikut :

Sasaran strategis “ Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ”, mempunyai 2 indikator sasaran yakni :

1. Indeks kualitas lingkungan hidup. Terkait dengan pencapaian kualitas lingkungan hidup yang baik, sehat dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas air, udara, tutupan lahan/hutan, pelaku usaha yang memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pencapaian Indikator sasaran fokus pada 3 Bidang yakni Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, dengan uraian program/kegiatan pendukung, sebagai tabel berikut :

**Tabel 2.1** Program Kegiatan Indikator Sasaran ke - 1

INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	KEGIATAN
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase Pemenuhan Kualitas Air Baik	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Pemantauan Kualitas Air
			Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)
	Persentase Pemenuhan Kualitas Udara Baik	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Pengawasan dan Penanggulangan bahan Perusak Ozon (BPO)
			Gas Rumah Kaca (GRK)
			Pemantauan dan Penanggulangan Pencemaran Sumber Pencemar Institusi dan Non Institusi
		Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Pengujian Emisi/Polusi Akibat Aktivitas Industri
	Persentase Luas Tutupan Hutan	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Pemeliharaan, Penghijauan Lingkungan
Koordinasi dan Fasilitas Pembangunan di Sektor			

			Kehutanan
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem
		Program Rehabilitasi dan Konservasi Cadangan Sumber Daya Aliam	Rehabilitasi Hutan dan Lahan
			Penanggulangan dan Rehabilitasi Mangrove
	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Pengelolaan Hutan Kota	
	Persentase Pelaku Usaha Yang Memenuhi Ketentuan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
			Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup
			Pengkajian Dampak Lingkungan
			Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)
			Koordinasi Penyusunan AMDAL
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		Peningkatan Pelayanan Sengketa lingkungan Hidup	
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya dan Lingkungan Hidup	Sosialisasi Program Sekolah Adiwiyata		

2. Persentase pengelolaan sampah secara terpadu, melalui pengurangan dan penanganan sampah yang didukung kapasitas pengelolaan lingkungan yang kuat sehingga terwujud pembangunan ramah lingkungan serta kehidupan masyarakat dalam lingkungan yang bersih dan sehat. Dalam pencapaian Indikator sasaran fokus Bidang Pengelolaan Sampah dan Limba B3, dengan uraian program/kegiatan pendukung, sebagai tabel berikut :

**Tabel 2.2** Program Kegiatan Indikator Sasaran Ke - 2

<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>
Persentase Pengelolaan Sampah Secara Terpadu	Persentase Penanganan Sampah	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
			Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
			Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan
			Inventarisasi Potensi Retribusi Persampahan
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	
Persentase Pengurangan Sampah	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan persampahan	

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan kepada pemberi mandat (wewenang) atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan (LKjIP).

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Banggai tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ataupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Banggai, tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *actuating* dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Secara umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana pembangunan



bidang lingkungan hidup di Kabupaten Banggai baik kegiatan yang bersifat administratif maupun yang bersifat teknis telah berjalan dengan baik.

Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja maka secara sistematis diuraikan tentang pengukuran kinerja, Evaluasi Kinerja, Analisis Akuntabilitas Kinerja dan selanjutnya ditutup dengan uraian akuntabilitas keuangan, yaitu sebagai berikut :

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Akuntabilitas kinerja merupakan pengukuran tingkat capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasi yang berhasil dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan. Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2019 didapatkan dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan target sesuai dengan indikator kinerja. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik dan sebaliknya jika semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Perhitungan Capaian Kinerja didapat dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Target}) \times 100\%$$

Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik. Adapun sasaran, indikator dan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai tahun 2019 dapat diuraikan dalam tabel berikut:

##### **1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019**

Adapun pengukuran capaian kinerja setiap sasaran Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Tahun 2019.

SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,00 %	82,065	122,49
	Persentase Pengelolaan Sampah Secara Terpadu	100 %	42,44	42,44

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat keberhasilan pencapaian sasaran Indikator Kinerja pada indeks kualitas lingkungan hidup melebihi target tahun 2019 sebesar 122,49 %, dan pada sasaran pengelolaan sampah secara terpadu capaian target hanya sebesar 42,44 % dibawah dari target tahun 2019.

Untuk menghitung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menggunakan formulasi  $IKLH = (IKA \times 30\%) + (IKU \times 30\%) + (IKTL \times 40\%)$ . Pada tabel perbandingan di atas terlihat bahwa capaian kinerja pada indikator sasaran IKLH sangat baik dari target capaian yang ditentukan yaitu realisasi sebesar 82,065 % melebihi target yang ditetapkan sebesar 67 %. Hal ini terjadi karena kondisi kualitas lingkungan Kabupaten Banggai yang masih tergolong baik, seperti kondisi badan air/sungai yang masih bersih dan jernih, kondisi udara yang masih segar dan bersih, serta

kondisi hutan yang wilayah tutupannya cukup luas dan masih terjaga kelestariannya. Dapat dibuktikan dari hasil perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 21,00%, Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 26,892 dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sebesar 34,172 %. Hal ini bisa terjadi juga karena peran serta pemerintah daerah dan masyarakat dalam melindungi dan mengelola lingkungan.

Untuk menghitung indikator sasaran persentase pengelolaan sampah secara terpadu menggunakan formulasi = % pengurangan sampah + % penanganan sampah. Pada tabel di atas menggambarkan bahwa realisasi capaian hanya sebesar 42,44 % dari target yang ditetapkan sebesar 100 %. Capaian target tersebut didapatkan dari penjumlahan realisasi persentase pengurangan sampah 5,46 % dari target 20 % dan penanganan sampah 36,98 % dari target 80 %. Kondisi ini terjadi diakibatkan beberapa kendala yang dihadapi antara lain :

1. Sarana dan prasarana dalam menunjang pengelolaan sampah belum memadai.
2. Ketersediaan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan sampah belum memadai.
3. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah masih kurang.

## 2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Sampai Dengan Tahun ini Dengan Tahun Lalu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017 (%)	% CAPAIAN	TARGET 2018 (%)	% CAPAIAN	TARGET 2019 (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN
Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,00	-	66,50	124,93	67,00	82,065	122,49
	Persentase Pengelolaan sampah secara terpadu	83,75	-	73,00	44,59	100	42,44	42,44

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat capaian target Renstra tahun 2019 tingkat pencapaian indikator kinerja ke satu melebihi target sebesar 122,49 %, indikator kinerja ke dua capaian target hanya sebesar 42,44 %. Sedangkan untuk capaian target tahun 2019 lebih rendah dibandingkan capaian target tahun 2018 dengan indikator kinerja ke satu 124,93 dan indikator ke dua 44,59

Pada indikator sasaran indeks kualitas lingkungan hidup dengan sasaran program berupa meningkatnya pengendalian pencemaran air, udara dan kerusakan lingkungan hidup serta meningkatnya ketaatan terhadap aturan lingkungan hidup. Sedangkan indikator sasaran

persentase Pengelolaan Sampah Secara Terpadu dengan sasaran program berupa meningkatnya pengurangan, penanganan sampah dan limbah B3 di Kabupaten Banggai.

a. Indikator Sasaran pertama.

Pada tahun 2019 IKLH Kabupaten Banggai mengalami penurunan capaian yaitu 82,065 % dari target tahun 2018 yaitu 83,082 %, hal ini terjadi karena adanya penurunan pada indeks kualitas udara. Pada tahun 2019 nilai SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub> pada lokasi transportasi dan industri mengalami kenaikan, yang disebabkan karena adanya peningkatan lalu lintas kendaraan dari tahun sebelumnya.

b. Indikator Sasaran Kedua.

Pada pengelolaan sampah secara terpadu mengalami penurunan dari tahun 2018 dari capaian 44,59 % menjadi 42,44 % di tahun 2019. Kondisi ini terjadi karena pada tahun 2019 mengalami kenaikan penetapan target capaian Renstra dari 73% menjadi 100%. Kegiatan pengurangan sampah yang melibatkan peran serta dari masyarakat masih rendah dan pada kegiatan penanganan sampah dimana sarana dan prasarana persampahan masih kurang memadai, masih kurangnya anggaran pemeliharaan kendaraan operasional, serta adanya permasalahan dalam penetapan sumber dana DBH dan PAD. sehingga mempengaruhi proses dari pengolahan sampah secara terpadu.

**3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis**

Tabel 3.3. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 dibandingkan Target Akhir Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kab.Banggai Tahun 2021.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI	TINGKAT KEMAJUAN
Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,60 %	82,065 %	119,62 %
	Persentase Pengelolaan Sampah Secara Terpadu	98 %	42,44 %	43,30 %

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat capaian kemajuan target Renstra tahun 2021, tingkat pencapaian Indikator Kinerja pada sasaran satu melebihi target sebesar dengan realisasi 82,065 % dari target renstra 68,60 % dengan tingkat kemajuan 119,62 %, sasaran dua dalam pengelolaan sampah target renstra tahun 2021 dengan target 98 % capaian realisasi 42,44 % dengan tingkat kemajuan 43,30 %.

**4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Dengan Standar Nasional**

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indeks dapat menjadi angka atau titik referensi kualitas lingkungan, apakah pada posisi kondisi yang baik atau buruk atau pada kisaran keduanya. Indeks bermakna sebagai pembanding atau komparasi, dimana suatu subyek relatif terhadap subyek lainnya. Penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup juga terkait erat dengan kebutuhan sasaran pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yaitu terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan menjadi baku pada rencana pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai pada tahun 2019 memiliki kesamaan dengan kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) tahun 2019 yaitu sama-sama menggunakan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU). Nilai IKLH nasional tahun 2019 yaitu sebesar 67% dengan target IKLH pada Renstra tahun 2019 sebesar 67 % sedangkan capaian realisasi DLH pada tahun 2019 melebihi target nasional sebesar 82,065 %. Selanjutnya data target pengelolaan sampah berdasarkan pada target nilai Jakstrada tahun 2019 yaitu sebesar 100 % dan realisasi pencapaian DLH Kabupaten Banggai Sebesar 42,44 %.

## 5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran program tidak terlepas dengan adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Banggai tahun Anggaran 2019 yang selaras dengan pencapaian target dimasing-masing kegiatan.

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa ada beberapa Indikator Kinerja yang mengalami keberhasilan ataupun kegagalan. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab kegagalan pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) antara lain:

- a. Belum maksimalnya ketersediaan anggaran dalam menunjang keberhasilan program/kegiatan yang telah direncanakan, terutama program/ kegiatan prioritas pembangunan.
- b. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan khususnya dalam meningkatkan pengelolaan sampah masih rendah.
- c. Sarana dan prasarana dalam menunjang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum memadai.
- d. Penempatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum sesuai dengan disiplin keilmuannya, sehingga tanggung jawab yang dibebankan tidak bisa diselesaikan dengan baik;



Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Kabupaten Banggai telah melakukan langkah - langkah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan ketersediaan anggaran dalam menunjang keberhasilan program/kegiatan yang telah direncanakan, terutama program/kegiatan prioritas pembangunan.
- b) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan khususnya dalam meningkatkan pengelolaan sampah.
- c) Penyediaan Sarana dan prasarana dalam menunjang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- d) Menempatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan disiplin ilmu yang sesuai tanggung jawabnya.

## 6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan agar dapat mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai.

Tabel : 3.6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	
			KINERJA (%)	ANGGARAN (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	82,065	89,96

	Hidup			
		Persentase Pengelolaan Sampah Secara Terpadu	42,44	98,12
2	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi kabupaten Banggai	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP A	94,22

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan, selanjutnya sumber daya biaya yang tersedia sebesar Rp.17.905.800.866,- telah dilakukan efisiensi dalam penggunaannya sebesar Rp.16.879.114.475,- (94,27%) sehingga terdapat saldo/sisa anggaran sebesar Rp.1.026.686.391,-

Sumber daya anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai yang terbagi dalam dalam 2 sasaran strategi pertama Meningkatkan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi terdiri dari :

- a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang terbagi dalam 19 kegiatan dengan jumlah pagu anggaran Rp. 976.643.166,- dengan realisasi keuangan Rp. 878.565.304,- (89,96%)
- b. Persentase pengelolaan sampah secara terpadu yang terbagi dalam 6

kegiatan dengan jumlah pagu anggaran Rp. 8.833.245.591,- dengan realisasi keuangan Rp. 8.666.877.845,- (98,12%)

- c. Nilai akuntabilitas kinerja terbagi dalam 25 kegiatan yang merupakan kegiatan pendukung pencapaian target tahun 2019 sesuai dokumen SAKIP dengan jumlah pagu anggaran Rp. 1.938.418.983,- dengan realisasi keuangan Rp. 1.826.337.574,- (94,22%)

Adapun Alokasi per sasaran pembangunan dapat dilihat pada table dibawah :

TABEL 3.6. ALOKASI PERSASARAN PEMBANGUNAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Program dan Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan kualitas air baik	12%	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				
					a. Pemantauan Kualitas Air	Persentase pemenuhan kualitas air sungai	21.640.000,00	21.640.000,00	100,00
					b. Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	Persentase rumah yang telah memiliki fasilitas sanitasi dasar	39.480.000,00	39.143.148,00	99,15
2.			Persentase Pemenuhan Kualitas Udara Baik	100%	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				
					a. Pengawasan dan Penanggulangan Bahan Perusak Ozon (BPO)	Persentase pelaku usaha yang menggunakan atau menghasilkan BPO	11.000.000,00	10.660.000,00	96,91
					b. Gas Rumah Kaca (GRK)	Jumlah dokumen gas rumah kaca yang disusun	18.900.000,00	18.900.000,00	100,00
					c. Pemantauan dan Penanggulangan Pencemaran Sumber Pencemaran Institusi dan Non Institusi	Persentase sumber pencemar pada institusi dan non institusi	22.264.000,00	22.264.000,00	100,00
					Program Peningkatan Pengendalian Polusi				
a. Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri	Persentase lokal yang diukur udara ambien	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00					
3.			Persentase luas tutupan hutan	67,38%	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				
					a. Pemeliharaan, Penghijauan Lingkungan	Luar areal penghijauan yang ditanami	52.121.000,00	52.021.000,00	99,81
					b. Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan di Sektor Kehutanan	Jumlah urusan bidang kehutanan yang dikoordinasikan	119.645.000,00	118.859.390,00	99,34
					Program Perlindungan dan Konservasi SDA				
					a. Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Jumlah jenis flora dan fauna	20.000.000,00	11.860.000,00	59,30
					Program Rehabilitasi dan Konservasi Cadangan SDA				

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Program dan Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
					a. Rehabilitasi hutan dan lahan	Luas kawasan hutan dan lahan yang ditanami	223.172.180,00	223.172.180,00	100,00
					b. Penanggulangan dan Rehabilitasi Mangrove	Luas lahan mangrove yang ditanami	59.604.650,00	59.604.650,00	100,00
					Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan				
					a. Pengelolaan Hutan Kota	Luas lokasi yang diidentifikasi	70.245.000,00	68.545.000,00	97,58
4.			Persentase pelaku usaha yang memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan hidup	80%	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				
					a. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Jumlah titik pantau adipura yang dinilai	116.880.000,00	31.215.700,00	26,71
					b. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup	Jumlah pelaku usaha yang taat aturan bidang lingkungan hidup	27.100.000,00	26.852.000,00	99,08
					c. Kajian Dampak Lingkungan	Jumlah rekomendasi ijin lingkungan yang dikeluarkan	12.850.000,00	12.850.000,00	100,00
					d. Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)	Persentase perusahaan yang dinilai pengelolaan lingkungan	31.760.000,00	31.279.100,00	98,49
					e. Koordinasi Penyusunan AMDAL	Jumlah koordinasi penyusunan rekomendasi ijin lingkungan yang dilaksanakan	48.500.000,00	48.249.800,00	99,48
					Program Perlindungan dan Konservasi SDA				
					a. Peningkatan Pelayanan Sengketa Lingkungan Hidup	jumlah pengaduan kasus yang diselesaikan	25.000.000,00	24.990.000,00	99,96
					Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya dan Lingkungan Hidup				
					a. Sosialisasi Program Sekolah Adiwiyata	Persentase sekolah yang dibina	44.481.336,00	44.459.336,00	99,95
5.		Persentase pengelolaan sampah secara terpadu	Persentase penanganan sampah	80%	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				
					a. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah sarana persampahan yang diadakan	1.193.572.000,00	1.087.362.600,00	91,10
					b. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Jumlah sarana yang dioperasikan dan dilakukan pemeliharaan	1.758.038.591,00	1.715.945.031,00	97,61
					c. Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan	Jumlah aparat pengelolaan persampahan	5.685.735.000,00	5.685.735.000,00	100,00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Program dan Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
					d. Inventarisasi potensi retribusi persampahan	Jumlah Potensi Retribusi yang diinventarisasi	17.115.000,00	17.115.000,00	100,00
					Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup				
					a. Pengelolaan B3 dan limbah B3	Jumlah pelaku usaha penghasil limbah B3	32.175.000,00	32.175.000,00	100,00
			Persentase pengurangan sampah	20%	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				
					a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah peserta sosialisasi	146.610.000,00	128.545.214,00	87,68
6	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Banggai	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP A	80	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
					a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang diproses /diagenda	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
					b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	85.480.444,00	75.004.977,00	87,75
					c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan	65.000.000,00	65.000.000,00	100,00
					d. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK yang dipergunakan	12.990.569,00	12.990.569,00	100,00
					e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
					f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang diadakan	55.000.000,00	54.955.700,00	99,92
					g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
					h. Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	10.000.000,00	9.840.000,00	98,40
					i. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Keluar Daerah	260.000.000,00	256.562.278,00	98,68
					j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	160.000.000,00	159.988.000,00	99,99
					k. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga honorer dan Petugas Keamanan	611.400.000,00	593.550.000,00	97,08
					l. Penguatan Kelembagaan UPTD	Jumlah sampel yang diuji	319.332.500,00	279.555.000,00	87,54

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Program dan Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
					a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	27.308.670,00	27.250.950,00	99,79
					b. Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	34.510.000,00	8.500.000,00	24,63
					c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua yang Dipelihara	46.400.000,00	45.763.700,00	98,63
					d. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00
					e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	5.375.000,00	5.375.000,00	100,00
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
					a. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal	54.015.800,00	42.355.000,00	78,41
					Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan				
					a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10.632.000,00	10.632.000,00	100,00
					b. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen prognosis realisasi anggaran	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
					c. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Jumlah dokumen RENJA, RKA, DPA, RKAP, DPPA dan LKJ PD	52.625.000,00	52.600.000,00	99,95
					d. Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKBU	6.875.000,00	6.869.400,00	99,92
					Program Pengembangan Sistem Informasi/ Data				
					a. Penyusunan Profil Perangkat Daerah	Jumlah profil perangkat daerah yang disusun	25.000.000,00	24.676.000,00	98,70
					b. Pemutakhiran Data Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian yang tersusun	7.374.000,00	7.374.000,00	100,00
					Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan				

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Program dan Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
					a. Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Jumlah dokumen evaluasi perencanaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan	64.000.000,00	62.395.000,00	97,49



## **7. Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja**

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai dimasa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Dari hasil evaluasi kelompok indikator kinerja kegiatan pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai tahun 2019 dapat diketahui bahwa rata - rata target kinerja kegiatannya hampir semuanya tercapai. Adapun evaluasi seluruh kegiatan pembangunan bidang lingkungan hidup yaitu sebanyak 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) sasaran strategis pendukung SAKIP dengan 3 (tiga) Indikator kinerja yang diuraikan dalam 13 program yang mencakup 50 kegiatan. Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2019 dengan alokasi anggaran pembangunan (sesuai pagu APBD) sebesar Rp.17.905.800.866,- dan realisasi sebesar Rp.16.879.114.475,- atau 94,27% dari total anggaran.

Dari pengukuran kinerja yang dilakukan sesuai dengan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja pelaksanaan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai secara umum sudah mendekati sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Namun demikian, capaian kinerja tersebut tidak berarti bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sempurna dilakukan. Peningkatan kinerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Permasalahan utama pengelolaan anggaran belanja adalah terbatasnya alokasi dan akumulasi dana yang dikelola pemerintah daerah sebagai akibat masih relatif rendahnya proporsi PAD dan DBH terhadap APBD Kabupaten Banggai, sehingga sebagian besar sumber dana untuk membiayai pengeluaran/belanja berasal dari dana perimbangan, terutama dana alokasi umum dan dana perimbangan lainnya yang dialokasikan oleh pemerintah pusat.

Tingginya penyerapan dana untuk membayar gaji dan tunjangan PNS, menyebabkan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagian besar terserap untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Sehingga menyebabkan proporsi Belanja Daerah 60% untuk Belanja Tidak Langsung dan 40% untuk Belanja Langsung belum terpenuhi. Selain itu sebagai akibat dari

terbatasnya kemampuan keuangan daerah maka untuk pemenuhan program dan kegiatan juga terbatas.

## **B. Realisasi Anggaran**

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2019 (setelah Perubahan APBD 2019) sebesar 94,27% dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per indikator, penyerapan anggaran terbesar pada program Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam (100%) dan Program Peningkatan Pengendalian Polusi (100%), sedangkan penyerapan terkecil pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (76,92%).

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran yang hampir mencapai 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2019 telah mencukupi. Dana yang dianggarkan sebesar Rp.17.905.800.866,- dan realisasinya sebesar Rp.16.879.114.475,- atau 94,27% dari total anggaran, untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada Dinas Lingkungan Hidup tahun 2019.

Anggaran dan realisasi belanja langsung serapan APBD tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

TABEL REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019

TABEL REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019								
SKPD	: DINAS LINGKUNGAN HIDUP							
TAHUN ANGGARAN	: 2019							
PROGRAM	KEGIATAN					% PENCAPAIAN TARGET	KET	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI			
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Input:					
			Jumlah Dana	Rp.	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
			- Output:					
			Jumlah Surat yang diproses/diagenda	Surat	2000	2000	100	
			- Outcome:					
			Nilai Akuntabilitas Kinja	Nilai	A	A		
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	- Input:					
			Jumlah Dana	Rp.	85.480.444,00	75.004.977,00	87,75	
			- Output:					
			Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening	3	3	100	
			- Outcome:					
			Nilai Akuntabilitas Kinja	Nilai	A	A		
	3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Input:					
			Jumlah Dana	Rp.	65.000.000,00	65.000.000,00	100,00	
			- Output:					
Jumlah Petugas Kebersihan			Orang	5	5	100		
- Outcome:								
		Nilai Akuntabilitas Kinja	Nilai	A	A			
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Input:						
		Jumlah Dana	Rp.	12.990.569,00	12.990.569,00	100,00		
		- Output:						
		Jumlah Jenis ATK yang dipergunakan	Jenis	26	26	100		
		- Outcome:						
		Nilai Akuntabilitas Kinja	Nilai	A	A			
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Input:						
		Jumlah Dana	Rp.	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00		
		- Output:						

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

PROGRAM	KEGIATAN					% PENCAPAIAN TARGET	KET
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Lembar	17.500	17.500	100	
		- Outcome:					
		Nilai Akuntabilitas Kinja	Nilai	A	A		
	<b>6</b>	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>					
		- Input:					
		Jumlah Dana	Rp.	55.000.000,00	54.955.700,00	99,92	
		- Output:					
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang diadakan	Buah	142	142	100	
		- Outcome:					
		Nilai Akuntabilitas Kinja	Nilai	A	A		
	<b>7</b>	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>					
		- Input:					
		Jumlah Dana	Rp.	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
		- Output:					
		Jumlah bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan	Terbitan	1	1	100	
		- Outcome:					
		Nilai Akuntabilitas Kinja	Nilai	A	A		
	<b>8</b>	<b>Penyediaan Makanan dan Minuman</b>					
		- Input:					
		Jumlah Dana	Rp.	10.000.000,00	9.840.000,00	98,40	
		- Output:					
		Jumlah Makanan dan Minuman	Dos	200	200	100	
		- Outcome:					
		Tingkat Pemanfaatan Administrasi Perkantoran	Nilai	A	A		
	<b>9</b>	<b>Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah</b>					
		- Input:					
		Jumlah Dana	Rp.	260.000.000,00	256.562.278,00	98,68	
		- Output:					
		Jumlah Perjalanan Dinas Keluar	Kali	20	20	100	
		- Outcome:					
		Nilai Akuntabilitas Kinja	Nilai	A	A		

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

PROGRAM	KEGIATAN					% PENCAPAIAN TARGET	KET
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	- Input:					
		Jumlah Dana	Rp.	160.000.000,00	159.988.000,00	99,99	
		- Output:					
		Jumlah Perjalanan Dinas Dalam	Kali	160	160	100	
	11 Penyediaan Jasa Administrasi	- Outcome:					
		Nilai Akuntabilitas Kinja	Nilai	A	A		
		- Input:					
	12 Penguatan Kelembagaan UPTD	Jumlah Dana	Rp.	319.332.500,00	279.555.000,00	87,54	
		- Output:					
		jumlah Pengujian Sampel	Sampel	9	9	100	
- Outcome:							
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Nilai Akuntabilitas Kinja	Nilai	A	A		
		- Input:					
		Jumlah Dana	Rp.	27.308.670,00	27.250.950,00	99,79	
		- Output:					
	2 Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Jenis	2	2	100	
		- Outcome:					
		Nilai Akuntabilitas Kinja	Nilai	A	A		
		- Input:					
2 Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Dana	Rp.	34.510.000,00	8.500.000,00	24,63		
	- Output:						
	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Jenis	3	1	33,33		
		- Outcome:					

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

PROGRAM	KEGIATAN					% PENCAPAIAN TARGET	KET
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	A	A		
	<b>3</b>	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	- Input:				
		Jumlah Dana	Rp.	46.400.000,00	45.763.700,00	98,63	
		- Output:					
		Jumlah Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua yang Dipelihara	Unit	11	11	100	
		- Outcome:					
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	A	A		
	<b>4</b>	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</b>	- Input:				
		Jumlah Dana	Rp.	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00	
		- Output:					
		Jumlah perlengkapan kantor yang	Jenis	1	1	100	
		- Outcome:					
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	A	A		
	<b>5</b>	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	- Input:				
		Jumlah Dana	Rp.	5.375.000,00	5.375.000,00	100,00	
		- Output:					
		Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Jenis	1	1	100	
		- Outcome:					
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	A	A		
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>1</b>	<b>Pendidikan dan Pelatihan Formal</b>	- Input:				
		Jumlah Dana	Rp.	54.015.800,00	42.355.000,00	78,41	
		- Output:					
		Jumlah aparatur yang mengikuti	Orang	5	2	40,00	
		- Outcome:					
		Persentase peningkatan disiplin ASN	%	100	100		

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

PROGRAM	KEGIATAN					% PENCAPAIAN TARGET	KET
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Input:				
			Jumlah Dana	Rp.	10.632.000,00	10.632.000,00	100,00
			- Output:				
			Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	4	4	100
			- Outcome:				
			Nilai Akuntabilitas Kinja	Nilai	A	A	
	2	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	- Input:				
			Jumlah Dana	Rp.	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
			- Output:				
			Jumlah dokumen prognosis realisasi anggaran	Dokumen	1	1	100
			- Outcome:				
			Nilai Akuntabilitas Kinja	Nilai	A	A	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	- Input:					
		Jumlah Dana	Rp.	52.625.000,00	52.600.000,00	99,95	
		- Output:					
		Jumlah dokumen RENJA, RKA, DPA, RKAP, DPPA dan LKPJ PD	Dokumen	6	6	100	
		- Outcome:					
		Nilai Akuntabilitas Kinja	Nilai	A	A		
4	Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah	- Input:					
		Jumlah Dana	Rp.	6.875.000,00	6.869.400,00	99,92	
		- Output:					
		Jumlah dokumen RKBU	Dokumen	1	1	100	
		- Outcome:					
		Nilai Akuntabilitas Kinja	Nilai	A	A		



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

PROGRAM	KEGIATAN					% PENCAPAIAN TARGET	KET	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI			
Program Pengembangan Sistem Informasi/ Data	1	Penyusunan Profil Perangkat Daerah	- Input:					
			Jumlah Dana	Rp.	25.000.000,00	24.676.000,00	98,70	
			- Output:					
			Jumlah profil perangkat daerah yang	Buku	1	1	100	
			- Outcome:					
			Nilai Akuntabilitas Kinja	Nilai	A	A		
	2	Pemutakhiran Data Kepegawaian	- Input:					
			Jumlah Dana	Rp.	7.374.000,00	7.374.000,00	100,00	
			- Output:					
			Jumlah dokumen kepegawaian yang	Dokumen	3	3	100	
			- Outcome:					
			Nilai Akuntabilitas Kinja	Nilai	A	A		
Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan	1	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	- Input:					
			Jumlah Dana	Rp.	64.000.000,00	62.395.000,00	97,49	
			- Output:					
			Jumlah dokumen evaluasi perencanaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan	Dokumen	12	12	100	
			- Outcome:					
			Nilai Akuntabilitas Kinja	Nilai	A	A		
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	- Input:					
			Jumlah Dana	Rp.	1.193.572.000,00	1.087.362.600,00	91,10	
			- Output:					
			Jumlah sarana persampahan yang	Unit	827	827	100	
			- Outcome:					
			Persentase pengelolaan sampah secara terpadu	%	100	42,44		
	2	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	- Input:					
			Jumlah Dana	Rp.	1.758.038.591,00	1.715.945.031,00	97,61	
			- Output:					

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

PROGRAM	KEGIATAN					% PENCAPAIAN TARGET	KET
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
		Jumlah sarana yang dioperasikan dan dilakukan pemeliharaan	Unit	50	50	100	
		- Outcome: Persentase pengelolaan sampah secara terpadu	%	100	42,44		
	<b>3</b>	<b>Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan</b>	- Input:				
		Jumlah Dana	Rp.	5.685.735.000,00	5.685.735.000,00	100,00	
		- Output: Jumlah aparat pengelolaan	Orang	330	330	100	
		- Outcome: Persentase Pengelolaan sampah secara terpadu	%	100	42,44		
	<b>4</b>	<b>Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan</b>	- Input:				
		Jumlah Dana	Rp.	146.610.000,00	128.545.214,00	87,68	
		- Output: Jumlah peserta sosialisasi	Orang	75	75	100	
		- Outcome: Persentase pengelolaan sampah secara terpadu	%	100	42,44		
	<b>5</b>	<b>Inventarisasi Potensi Retribusi Persampahan</b>	- Input:				
		Jumlah Dana	Rp.	17.115.000,00	17.115.000,00	100,00	
		- Output: Jumlah Potensi Retribusi yang diinventarisasi	KK	250	250	100	
		- Outcome: Persentase pengelolaan sampah secara terpadu	%	100	42,44		
<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>1</b>	<b>Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura</b>	- Input:				
		- Output: Jumlah titik pantau adipura yang dinilai	Titik	28	28	100	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

PROGRAM	KEGIATAN					% PENCAPAIAN TARGET	KET
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
		- Outcome: Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	67	82,065		
	2	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan					
		- Input: Jumlah Dana	Rp.	27.100.000,00	26.852.000,00	99,08	
		- Output: Jumlah pelaku usaha yang taat aturan bidang lingkungan hidup	Pelaku usaha	25	25	100	
		- Outcome: Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	67	82,065		
	3	Pengelolaan B3 dan Limbah B3					
		- Input: Jumlah Dana	Rp.	32.175.000,00	32.175.000,00	100,00	
		- Output: Jumlah pelaku usaha penghasil limbah	Pelaku usaha	88	88	100	
		- Outcome: Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	67	82,065		
	4	Pengkajian dampak lingkungan					
		- Input: Jumlah Dana	Rp.	12.850.000,00	12.850.000,00	100,00	
		- Output: Jumlah rekomendasi ijin lingkungan yang dikeluarkan	Rekomendasi	30	30	100	
		- Outcome: Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	67	82,065		
	5	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)					
		- Input: Jumlah Dana	Rp.	31.760.000,00	31.279.100,00	98,49	
		- Output: Persentase perusahaan yang dinilai pengelolaan lingkungan	%	100	100	100	
		- Outcome: Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	67	82,065		

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

PROGRAM	KEGIATAN					% PENCAPAIAN TARGET	KET
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
	6	Koordinasi penyusunan AMDAL	- Input:				
			Jumlah Dana	Rp.	48.500.000,00	48.249.800,00	99,48
			- Output:				
			Jumlah koordinasi penyusunan rekomendasi ijin lingkungan yang	Kali	6	6	100
	7	Pemantauan Kualitas Air	- Outcome:				
			Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	67	82,065	
			- Input:				
			Jumlah Dana	Rp.	21.640.000,00	21.640.000,00	100,00
	8	Pengawasan dan Penanggulangan Bahan Perusak Ozon (BPO)	- Output:				
			Persentase pelaku usaha yang menggunakan atau menghasilkan BPO	%	80	80	100
			- Outcome:				
			Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	67	82,065	
	9	Gas Rumah Kaca (GRK)	- Input:				
			Jumlah Dana	Rp.	18.900.000,00	18.900.000,00	100,00
			- Output:				
			Jumlah dokumen gas rumah kaca yang disusun	Dokumen	1	1	100
	10	Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	- Outcome:				
			Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	67	82,065	
			- Input:				
			Jumlah Dana	Rp.	39.480.000,00	39.143.148,00	99,15
			- Output:				

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

PROGRAM	KEGIATAN					% PENCAPAIAN TARGET	KET
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
		Persentase rumah yang telah memiliki fasilitas sanitasi dasar	%	70	70	100	
		- Outcome:					
		Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	67	82,065		
	<b>11</b>	<b>Pemantauan dan Penanggulangan Pencemaran Sumber Pencemar Institusi dan Non Institusi</b>	- Input:				
		Jumlah Dana	Rp.	22.264.000,00	22.264.000,00	100,00	
		- Output:					
		Persentase sumber pencemar pada institusi dan non institusi	%	60	60	100	
		- Outcome:					
		Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	67	82,065		
	<b>12</b>	<b>Pemeliharaan, Penghijauan Lingkungan</b>	- Input:				
		Jumlah Dana	Rp.	52.121.000,00	52.021.000,00	99,81	
		- Output:					
		Luar areal penghijauan yang ditanami	Ha	6,59	6,59	100	
		- Outcome:					
		Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	67	82,065		
	<b>13</b>	<b>Koordinasi dan Fasilitas Pembangunan di Sektor Kehutanan</b>	- Input:				
		Jumlah Dana	Rp.	119.645.000,00	118.859.390,00	99,34	
		- Output:					
		Jumlah urusan bidang kehutanan yang dikoordinasikan	Urusan	2	2	100	
		- Outcome:					
		Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	67	82,065		
<b>Program Perlindungan dan Konservasi SDA</b>	<b>1</b>	<b>Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem</b>	- Input:				
		Jumlah Dana	Rp.	20.000.000,00	11.860.000,00	59,30	
		- Output:					
		Jumlah jenis flora dan fauna	Jenis	23	23	100	
		- Outcome:					
		Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	67	82,065		

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

PROGRAM	KEGIATAN					% PENCAPAIAN TARGET	KET			
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI					
	2	Peningkatan Pelayanan Sengketa Lingkungan Hidup	- Input:							
			Jumlah Dana	Rp.	25.000.000,00	24.990.000,00	99,96			
			- Output:							
			jumlah pengaduan kasus yang	Kasus	15	15	100			
			- Outcome:							
			Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	67	82,065				
			Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA	1	Rehabilitasi hutan dan lahan	- Input:				
						Jumlah Dana	Rp.	223.172.180,00	223.172.180,00	100,00
- Output:										
Luas kawasan hutan dan lahan yang	Ha	72				72	100			
			- Outcome:							
			Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	67	82,065				
				2	Penanggulangan dan Rehabilitasi Mangrove	- Input:				
						Jumlah Dana	Rp.	59.604.650,00	59.604.650,00	100,00
- Output:										
Luas lahan mangrove yang ditanami	Ha	2				2	100			
			- Outcome:							
			Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	67	82,065				
			Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya dan Lingkungan Hidup	1	Sosialisasi Program Sekolah Adiwiyata	- Input:				
						Jumlah Dana	Rp.	44.481.336,00	44.459.336,00	99,95
- Output:										
Persentase sekolah yang dibina	Sekolah	9				9	100			
			- Outcome:							
			Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	67	82,065				
			Program Peningkatan Pengendalian Polusi	1	Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri	- Input:				
						Jumlah Dana	Rp.	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
- Output:										
Persentase lokal yang diukur udara	%	80				80	100			
			- Outcome:							
			Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	67	82,065				

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

PROGRAM	KEGIATAN					% PENCAPAIAN TARGET	KET
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	1	Pengelolaan Hutan Kota	- Input:				
			Jumlah Dana	Rp.	70.245.000,00	68.545.000,00	97,58
			- Output:				
			Luas lokasi yang diidentifikasi	Ha	197	197	100
			- Outcome:				
		Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	67	82,065		

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN**

Dari Pengukuran kinerja yang dilakukan sesuai dengan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja Pelaksanaan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai secara umum sudah mendekati sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Namun demikian capaian kinerja tersebut tak berarti bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sempurna dilakukan. Peningkatan kinerja di Dinas Lingkungan Hidup tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga tujuan Dinas Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Fungsi utama yang di harapkan dari Dinas Lingkungan Hidup yakni, penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian dampak lingkungan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pencegahan, pengendalian dan pemulihan dampak lingkungan serta pelaksanaan pembinaan/pelatihan untuk usaha yang menimbulkan limbah.

Pencapaian kinerja sesuai sasaran strategis yang dilihat pada pencapaian indikator kinerja yakni IKLH dengan target 67,00 realisasi 82,065 (122,49 %) dan Persentase pengelolaan sampah secara terpadu dengan target 100 % realisasi 42,44 %. Sedangkan dari segi anggaran sebagian



besar terealisasi sesuai dengan target yang direncanakan.

## **B. PERMASALAHAN YANG BERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN KINERJA**

Beberapa masalah yang masih menjadi perhatian bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai sebagaimana berikut:

1. Masih banyak kegiatan/usaha belum optimal dalam melaksanakan kewajiban pengelolaan dampak lingkungan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup.
2. Sarana dan prasarana dalam menunjang pengelolaan sampah belum memadai.
3. Ketersediaan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan sampah belum memadai.
4. Masih kurangnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup utamanya dalam pengelolaan sampah
5. Masih kurangnya Industri yang taat pelaporan RKL-RPL dan rata-rata pemegang ijin lingkungan belum mampu menyusun laporan RKL-RPL dengan baik
6. Rata-rata Pemegang ijin lingkungan belum memahami bahwa laporan RKL-RPL adalah sebuah kemajuan bagi pemegang ijin lingkungan
7. Sebagian industri/kegiatan belum memahami tata cara perijinan LB3
8. Masih kurangnya kesadaran para pelaku usaha dalam pembuangan dan mengelola limbah cair secara baik.

### **C. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH**

Adapun solusi pemecahan masalah, adalah sebagai berikut :

- a. Perlu ditingkatkan pengawasan, pembinaan/sosialisasi bagi kegiatan/usaha dalam hal melaksanakan dan melaporkan dokumen lingkungan, pengendalian pencemaran air dan udara serta pengelolaan limbah B3 sebagai upaya pengendalian pencemaran dan perlindungan kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Banggai.
- b. Perlu segera penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah.
- c. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia aparat pengelolaan sampah melalui Diklat, Bimtek, Workshop dan Sosialisasi.
- d. Diperlukan pembinaan/sosialisasi kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- e. Pembinaan teknis bagi penyusunan laporan RKL-RPL secara kontinyu dan berkelanjutan.
- f. Pemberian penghargaan bagi industri dengan laporan RKL-RPL terbaik.
- g. Melaksanakan inventarisasi data dan pembinaan secara kontinyu bagi industri penghasil limbah B3 di Kabupaten Banggai.

Untuk mempertahankan dan lebih meningkatkan kinerja yang telah dicapai, diperlukan adanya dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak terkait pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Tahun 2019, semoga hasil pencapaian kinerja yang tertuang dalam LKjIP ini menjadi acuan dalam evaluasi kinerja Dinas untuk masa yang akan datang.

Luwuk, Februari 2020  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN BANGGAI,



**MUH. SAFARI JUNUS, SH., M.Si**

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 19650413 199303 1 006

TABEL 3.6. ALOKASI PERSASARAN PEMBANGUNAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Program dan Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan kualitas air baik	12%	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				
					a. Pemantauan Kualitas Air	Persentase pemenuhan kualitas air sungai	21,640,000.00	21,640,000.00	100.00
2.			Persentase Pemenuhan Kualitas Udara Baik	100%	b. Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	Persentase rumah yang telah memiliki fasilitas sanitasi dasar	39,480,000.00	39,143,148.00	99.15
					Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				
3.			Persentase luas tutupan hutan	67.38%	a. Pengawasan dan Penanggulangan Bahan Perusak Ozon (BPO)	Persentase pelaku usaha yang menggunakan atau menghasilkan BPO	11,000,000.00	10,660,000.00	96.91
					b. Gas Rumah Kaca (GRK)	Jumlah dokumen gas rumah kaca yang disusun	18,900,000.00	18,900,000.00	100.00
					c. Pemantauan dan Penanggulangan Pencemaran Sumber Pencemaran Institusi dan Non Institusi	Persentase sumber pencemar pada institusi dan non institusi	22,264,000.00	22,264,000.00	100.00
					Program Peningkatan Pengendalian Polusi				
					a. Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri	Persentase lokal yang diukur udara ambien	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00
					Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				
					a. Pemeliharaan, Penghijauan Lingkungan	Luar areal penghijauan yang ditanami	52,121,000.00	52,021,000.00	99.81
					b. Koordinasi dan Fasilitas Pembangunan di Sektor Kehutanan	Jumlah urusan bidang kehutanan yang dikoordinasikan	119,645,000.00	118,859,390.00	99.34
					Program Perlindungan dan Konservasi SDA				
					a. Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Jumlah jenis flora dan fauna	20,000,000.00	11,860,000.00	59.30
					Program Rehabilitasi dan Konservasi Cadangan SDA				
No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Program dan Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)

4.			Persentase pelaku usaha yang memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan hidup	80%	a. Rehabilitasi hutan dan lahan	Luas kawasan hutan dan lahan yang ditanami	223,172,180.00	223,172,180.00	100.00				
					b. Penanggulangan dan Rehabilitasi Mangrove	Luas lahan mangrove yang ditanami	59,604,650.00	59,604,650.00	100.00				
					Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan								
					a. Pengelolaan Hutan Kota	Luas lokasi yang diidentifikasi	70,245,000.00	68,545,000.00	97.58				
					Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup								
					a. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Jumlah titik pantau adipura yang dinilai	116,880,000.00	31,215,700.00	26.71				
					b. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup	Jumlah pelaku usaha yang taat aturan bidang lingkungan hidup	27,100,000.00	26,852,000.00	99.08				
					c. Kajian Dampak Lingkungan	Jumlah rekomendasi ijin lingkungan yang dikeluarkan	12,850,000.00	12,850,000.00	100.00				
					d. Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)	Persentase perusahaan yang dinilai pengelolaan lingkungan	31,760,000.00	31,279,100.00	98.49				
					e. Koordinasi Penyusunan AMDAL	Jumlah koordinasi penyusunan rekomendasi ijin lingkungan yang dilaksanakan	48,500,000.00	48,249,800.00	99.48				
					Program Perlindungan dan Konservasi SDA								
					a. Peningkatan Pelayanan Sengketa Lingkungan Hidup	jumlah pengaduan kasus yang diselesaikan	25,000,000.00	24,990,000.00	99.96				
					Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya dan Lingkungan Hidup								
					a. Sosialisasi Program Sekolah Adiwiyata	Persentase sekolah yang dibina	44,481,336.00	44,459,336.00	99.95				
5.		Persentase pengelolaan sampah secara terpadu	Persentase penanganan sampah	80%	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan								
					a. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah sarana persampahan yang diadakan	#####	#####	91.10				
					b. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana	Jumlah sarana yang dioperasikan dan dilakukan pemeliharaan	#####	#####	97.61				
					c. Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan	Jumlah aparat pengelolaan persampahan	#####	#####	100.00				
<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja Program</b>	<b>Target (%)</b>	<b>Program dan Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>				
					d. Inventarisasi potensi retribusi persampahan	Jumlah Potensi Retribusi yang diinventarisasi	17,115,000.00	17,115,000.00	100.00				

					Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup				
			Persentase pengurangan sampah		a. Pengelolaan B3 dan limbah B3	Jumlah pelaku usaha penghasil limbah B3	32,175,000.00	32,175,000.00	100.00
				20%	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				
					a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah peserta sosialisasi	146,610,000.00	128,545,214.00	87.68
6	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Banggai	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP A	80	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
					a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang diproses /diagenda	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00
					b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	85,480,444.00	75,004,977.00	87.75
					c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan	65,000,000.00	65,000,000.00	100.00
					d. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK yang dipergunakan	12,990,569.00	12,990,569.00	100.00
					e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	7,000,000.00	7,000,000.00	100.00
					f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang diadakan	55,000,000.00	54,955,700.00	99.92
					g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00
					h. Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	10,000,000.00	9,840,000.00	98.40
					i. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Keluar Daerah	260,000,000.00	256,562,278.00	98.68
					j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	160,000,000.00	159,988,000.00	99.99
					k. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga honorer dan Petugas Keamanan	611,400,000.00	593,550,000.00	97.08
					l. Penguatan Kelembagaan UPTD	Jumlah sampel yang diuji	319,332,500.00	279,555,000.00	87.54
<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja Program</b>	<b>Target (%)</b>	<b>Program dan Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
					a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	27,308,670.00	27,250,950.00	99.79

					b.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	34,510,000.00	8,500,000.00	24.63
					c.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua yang Dipelihara	46,400,000.00	45,763,700.00	98.63
					d.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	2,100,000.00	2,100,000.00	100.00
					e.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	5,375,000.00	5,375,000.00	100.00
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
					a.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal	54,015,800.00	42,355,000.00	78.41
					Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan					
					a.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	10,632,000.00	10,632,000.00	100.00
					b.	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen prognosis realisasi anggaran	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00
					c.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Jumlah dokumen RENJA, RKA, DPA, RKAP, DPPA dan LKPJ PD	52,625,000.00	52,600,000.00	99.95
					d.	Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKBU	6,875,000.00	6,869,400.00	99.92
					Program Pengembangan Sistem Informasi/ Data					
					a.	Penyusunan Profil Perangkat Daerah	Jumlah profil perangkat daerah yang disusun	25,000,000.00	24,676,000.00	98.70
					b.	Pemutakhiran Data Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian yang tersusun	7,374,000.00	7,374,000.00	100.00
					Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan					
<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja Program</b>	<b>Target (%)</b>	<b>Program dan Kegiatan</b>		<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
					a.	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Jumlah dokumen evaluasi perencanaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan	64,000,000.00	62,395,000.00	97.49













L